

Analysis Financial Performance in Supporting the Implementation of Regional Autonomy in Districts and Cities in the Kalimantan Region 2014-2021.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan Tahun 2014-2021

Ainaya Al Fatihah^a, Handry Imansyah^b, Saifudin^c, Muzdalifah^d, Anshar Nur^e
Magister Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Lambung Mangkurat^{a,b,c,d,e}
ainayaalfatihah22@gmail.com^a

Abstract

One measure of the success of regional autonomy can be seen from the regional financial capacity. So the aim of this research is to find out how regional autonomy is implemented and the financial dependence of regional governments on the central government in the Kalimantan Regional Districts and Cities 2014-2021. The method used in this research is quantitative descriptive research with research methods analyzing the independence ratio, the degree of fiscal decentralization ratio, the routine capability index ratio and the dependency ratio. By using secondary data in the form of budget realization reports obtained from the Republic of Indonesia Financial Audit Agency which were published from 2014 to 2021 covering 56 regencies and cities in the Kalimantan Region. The results of the analysis of the independence ratio in Kalimantan Regional Districts from 2014-2021 were overall stated to be low or not yet independent. The Degree of Fiscal Decentralization Ratio is stated to be low. The Routine Ability Index ratio is also still said to be low. Meanwhile, the Dependency Ratio is stated to be high.

Keywords: *Regional Autonomy, Regional Financial Capability, Independence Ratio, Dependency Ratio.*

Abstrak

Salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah. Sehingga dapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan otonomi daerah serta ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sebagai di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan tahun 2014-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode penelitian analisis rasio kemandirian, rasio otonomi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin dan rasio ketergantungan. Dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang di publish dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 meliputi 56 Kabupaten-Kota di Regional Kalimantan. Hasil analisis Rasio Kemandirian di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan dari tahun 2014-2021 secara keseluruhan dinyatakan rendah atau belum mandiri. Rasio Otonomi Fiskal di nyatakan rendah. Rasio Indeks Kemampuan Rutin juga masih dikatakan rendah. Sedangkan untuk Rasio Ketergantungan di nyatakan tinggi.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kemampuan Keuangan daerah, Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan.

1. Pendahuluan

Suatu daerah untuk melaksanakan sendiri pembangunannya harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketergantungan yang semakin membesar bagi pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dari sektor ekonomi potensial harus dikelola dengan baik. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya

menjalankan kewenangannya tetapi juga harus menjalankan otonominya yakni dengan meningkatkan kemandirian daerah tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Regulasi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah yang kini lebih bergantung pada sumber pendapatan daerah daripada pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menitikberatkan pada pembagian kewenangan (*power sharing*), sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur pembagian keuangan (*financial sharing*) antara pusat dan daerah. Kedua regulasi ini menjadi dasar desentralisasi fiskal yang bertujuan meningkatkan efisiensi ekonomi, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, demokrasi, serta penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi daerah. Namun, peningkatan kewenangan daerah juga diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, sehingga diperlukan kesiapan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana. Kemampuan keuangan daerah menjadi indikator utama keberhasilan otonomi, yang dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, daerah dituntut mampu mengoptimalkan potensi pendapatan tanpa harus menciptakan pajak baru secara berlebihan.

Salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Pemerintah daerah diberi kewenangan memungut berbagai jenis pajak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta menetapkan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap APBD masih relatif kecil, sehingga banyak daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menunjukkan pentingnya optimalisasi sumber pendapatan daerah, khususnya di wilayah seperti kabupaten/kota di regional Kalimantan, guna mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Kemampuan pemerintah daerah di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Untuk itu evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam mengkategorikan daerahnya sebagai daerah yang otonom.

Sehingga yang menjadi masalah dalam penelitian ini bahwa untuk menjadi suatu daerah otonom maka salah satu unsur penting yaitu diperlukan adanya sumber keuangan yang cukup oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap realita kondisi keuangan daerah di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan dari tinjauan kebelakang berkaitan dengan realisasi keuangan daerah maka penelitian dilakukan untuk menganalisis kinerja Keuangan Kabupaten-Kota Regional Kalimantan menjadi daerah otonom dalam konsep kemampuan desentralisasi otonomi daerah dibatasi pada

aspek keuangan yang meliputi struktur dan pengesahan dalam menghitung rasio keuangan daerah yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Penerimaan Daerah (TPD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAU), Bagi Hasil Pajak, Belanja Rutin, dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan melihat latar belakang diatas, maka penulis perlu melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN-KOTA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2014-2021”

2. Metode

Waktu, Tempat, dan Objek Penelitian

Waktu yang digunakan unit analisis yang termuat dalam penelitian ini selama 8 tahun, terhitung sejak berdirinya Kalimantan Utara sebagai daerah otonom di tahun 2014. Penelitian ini menggunakan studi kasus yang bertempat di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten-Kota Regional Kalimantan berdasarkan data yang dibutuhkan untuk membantu penelitian ini. Objek dari penelitian ini adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten-Kota Regional Kalimantan. Unit analisis yang termuat dalam penelitian ini adalah APBD Kabupaten-Kota Regional Kalimantan selama 8 tahun.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Regional Kalimantan periode 2014–2021. Sampel yang digunakan mencakup periode yang sama untuk menganalisis tingkat kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dari tahun ke tahun.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten/Kota Regional Kalimantan periode 2014–2021. Data kuantitatif: Laporan Realisasi Anggaran daerah. Data kualitatif: teori, peraturan perundang-undangan, dan gambaran umum objek penelitian.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Kementerian Keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi: Pengumpulan data sekunder dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Regional Kalimantan.
2. Studi Kepustakaan: Mengumpulkan dan mempelajari literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan menggunakan rasio keuangan daerah dengan langkah-langkah:

1. Mengumpulkan data terkait kinerja keuangan daerah.
2. Mengelompokkan data sebagai dasar operasional variabel.
3. Menghitung dan menyajikan rasio keuangan daerah.

4. Menarik kesimpulan mengenai kinerja keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah.
5. Menganalisis permasalahan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan hasil analisis data.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Kinerja Keuangan Daerah diukur dari Rasio Kemandirian, Derajat Otonomi Fiskal dan Indeks Kemampuan Rutin

a. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan Tahun 2014-2021.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer. Semakin tinggi resiko kemandirian menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana transfer semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Analisis rasio kemandirian daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Berikut Tabel hasil analisis rasio kemandirian keuangan di kabupaten-kota Regional Kalimantan tahun 2014-2021:

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan Tahun 2014-2021

Provinsi	Kota/Kabupaten	Tahun								Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Prov. Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	6.09	5.62	5.31	5.12	6.52	6.05	7.27	6.69	6.08
	Kab. Landak	11.93	5.89	6.03	12.65	8.13	9.46	11.09	8.51	9.21
	Kab. Kapuas Hulu	7.87	6.29	4.99	10.11	5.84	5.75	6.66	4.84	6.54
	Kab. Ketapang	8.40	8.75	8.84	10.81	12.09	11.44	15.03	13.01	11.05
	Kab. Mempawah	10.44	7.74	7.83	9.11	9.47	11.15	14.25	10.94	10.11
	Kab. Sambas	13.09	8.58	8.21	16.32	10.19	11.37	11.04	9.40	11.03
	Kab. Sanggau	9.03	9.09	8.82	12.86	10.01	9.55	11.40	8.97	9.97
	Kab. Sintang	9.60	9.07	8.38	8.06	18.43	13.12	11.29	10.18	11.01
	Kota Pontianak	41.08	45.74	43.72	52.56	46.72	50.66	46.41	37.90	45.60
	Kota Singkawang	16.69	17.72	17.04	22.07	21.27	25.01	26.81	25.98	21.57
	Kab. Sekadau	6.67	6.24	5.62	11.02	8.72	6.90	7.82	5.73	7.34
	Kab. Melawi	3.78	4.00	3.89	7.12	5.02	4.57	4.32	5.53	4.78
	Kab. Kayong Utara	3.71	2.54	1.73	5.34	4.27	4.47	6.77	4.33	4.14
Kab. Kubu Raya	11.57	9.69	9.62	14.56	16.18	15.93	15.65	12.28	13.19	
Rata-rata		11.42	10.50	10.00	14.12	13.06	13.25	13.99	11.73	
Prov. Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	4.85	5.50	5.61	6.41	10.04	9.78	7.74	11.13	7.63
	Kab. Barito Utara	5.77	6.39	5.80	8.06	8.90	7.84	8.98	9.40	7.64
	Kab. Kapuas	7.29	8.09	6.19	6.99	8.22	11.12	10.10	9.07	8.38
	Kab. Kotawaringin Barat	16.33	17.35	14.34	18.85	19.67	17.69	23.43	32.58	20.03

	Kab. Kotawaringin Timur	18.34	16.44	15.73	22.32	17.65	18.00	22.29	24.72	19.44
	Kota Palangka Raya	12.77	17.30	15.26	17.93	20.47	20.31	21.99	31.03	19.63
	Kab. Katingan	6.42	4.78	5.04	5.76	5.29	6.58	7.02	5.97	5.86
	Kab. Seruyan	4.09	5.50	6.57	12.82	10.52	10.10	8.93	8.26	8.35
	Kab. Sukamara	4.43	5.01	5.79	8.76	7.62	6.93	8.15	9.31	7.00
	Kab. Lamandau	6.08	6.29	5.97	26.95	14.49	11.06	8.69	12.26	11.47
	Kab. Gunung Mas	4.86	4.89	4.55	4.23	5.25	9.60	9.06	8.82	6.41
	Kab. Pulang Pisau	5.33	5.08	4.51	4.84	5.19	10.59	5.96	14.29	6.97
	Kab. Murung Raya	4.73	6.39	3.27	7.16	5.94	8.68	8.52	9.57	6.78
	Kab. Barito Timur	9.97	6.06	4.98	16.48	7.10	8.28	9.54	11.64	9.26
Rata-rata		7.95	8.22	7.40	11.97	10.45	11.18	11.46	14.15	
Prov. Kalimantan Selatan	Kab. Banjar	18.39	17.15	15.01	16.73	15.69	17.51	18.63	15.27	16.80
	Kab. Barito Kuala	9.50	7.85	5.94	10.68	11.57	8.92	7.83	9.66	8.99
	Kab. Hulu Sungai Selatan	12.56	12.63	10.70	17.39	13.94	15.88	23.42	23.10	16.20
	Kab. Hulu Sungai Tengah	12.95	10.41	10.41	15.38	11.04	13.27	19.08	13.17	13.21
	Kab. Hulu Sungai Utara	14.15	13.22	10.25	18.14	13.11	17.00	15.57	12.92	14.29
	Kab. Kotabaru	11.58	15.14	13.13	12.41	13.13	11.80	14.55	14.94	13.34
	Kab. Tabalong	16.33	13.56	11.20	19.69	17.01	16.15	17.53	15.86	15.92
	Kab. Tanah Laut	16.23	16.52	13.09	20.36	10.90	11.91	17.17	16.18	15.30
	Kab. Tapin	7.51	6.66	6.48	11.53	10.01	9.62	11.84	11.56	9.40
	Kota Banjarbaru	22.32	23.23	20.55	35.69	31.53	36.36	32.79	42.65	30.64
	Kota Banjarmasin	25.69	26.62	22.20	32.73	27.03	31.65	28.32	30.41	28.08
	Kab. Balangan	8.53	6.65	5.49	10.46	6.79	6.87	10.67	14.06	8.69
Kab. Tanah Bumbu	14.43	12.82	10.71	17.43	17.42	10.33	14.28	10.93	13.54	
Rata-rata		14.63	14.04	11.93	18.36	15.32	15.94	17.82	17.75	
Prov. Kalimantan Timur	Kab. Berau	14.63	14.84	13.89	15.87	12.51	11.45	14.29	13.93	13.93
	Kab. Kutai Kartanegara	6.45	8.00	7.79	17.53	9.69	12.69	12.79	19.56	11.81
	Kab. Kutai Barat	8.22	5.53	5.72	11.29	6.39	9.21	9.21	7.94	7.94
	Kab. Kutai Timur	8.23	5.51	21.51	11.43	6.31	7.68	8.55	9.12	9.79
	Kab. Paser	8.06	8.30	8.64	11.44	10.85	10.25	11.45	14.12	10.39
	Kota Balikpapan	56.95	50.55	52.54	74.90	59.01	67.26	42.95	52.32	57.06
	Kota Bontang	15.59	14.18	18.69	23.57	23.29	21.96	19.21	26.63	20.39
	Kota Samarinda	28.31	27.21	24.19	41.50	33.03	31.06	31.71	26.42	30.43
	Kab. Penajam Paser Utara	5.45	7.16	24.08	15.80	7.43	7.87	9.50	7.95	10.66
Kab. Mahakam Ulu	0.71	1.82	1.88	1.49	1.65	1.50	1.93	2.96	1.74	
Rata-rata		15.26	14.31	17.89	22.48	17.02	18.09	16.16	18.10	
Prov. Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	9.72	17.20	10.92	15.81	14.44	14.78	15.97	14.54	14.17
	Kab. Malinau	6.62	7.22	4.54	5.48	5.04	5.93	5.69	5.65	5.77
	Kab. Nunukan	8.16	13.72	7.66	10.06	9.72	12.58	14.69	14.85	11.43
	Kota Tarakan	8.30	15.56	8.87	11.45	10.04	9.60	15.59	17.22	12.08
	Kab. Tana Tidung	4.75	8.30	3.13	4.83	3.42	3.25	1.92	2.66	4.03
Rata-rata		7.51	12.40	7.02	9.53	8.53	9.23	10.77	10.98	

Sumber: Data diolah

Secara umum, tingkat kemandirian keuangan daerah di wilayah Kalimantan masih didominasi kategori Sangat Kurang hingga Kurang, dengan hanya beberapa kota yang menunjukkan kinerja Baik.

Di Kalimantan Barat, Kota Pontianak memiliki tingkat kemandirian tertinggi (42,83% – kategori Baik) karena didukung aktivitas ekonomi, perdagangan, dan infrastruktur yang maju. Sebaliknya, Kabupaten Melawi terendah (4,00% – Sangat Kurang) akibat rendahnya PAD, minim investasi, serta keterbatasan akses dan kapasitas fiskal.

Di Kalimantan Tengah, kemandirian fiskal relatif rendah. Kabupaten Kotawaringin Timur tertinggi (20,03% – Kurang) namun belum mandiri, sedangkan Kabupaten Sukamara terendah (6,64% – Sangat Kurang). Hal ini dipengaruhi ketergantungan pada sektor ekstraktif dan rendahnya optimalisasi PAD.

Di Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin memiliki kemandirian tertinggi (45,88% – Baik) karena sektor perdagangan, jasa, dan infrastruktur yang berkembang. Sebaliknya, Kabupaten Tapin terendah (6,86% – Sangat Kurang) akibat terbatasnya PAD dan dominasi sektor primer.

Di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menunjukkan kemandirian tinggi (42,57%) berkat ekonomi yang terdiversifikasi, investasi tinggi, dan infrastruktur maju. Sebaliknya, Kabupaten Mahakam Ulu terendah (1,74%) karena wilayah baru, keterpencilan, dan rendahnya kapasitas ekonomi serta kelembagaan.

Di Kalimantan Utara, seluruh daerah masih memiliki kemandirian rendah. Kota Tarakan tertinggi (15,48% – Kurang), sedangkan Kabupaten Tana Tidung terendah (5,36% – Sangat Kurang). Faktor penyebabnya meliputi usia provinsi yang masih muda, keterbatasan infrastruktur, ekonomi yang sempit, serta rendahnya investasi. Secara keseluruhan, perbedaan kemandirian fiskal dipengaruhi oleh kapasitas PAD, struktur ekonomi, infrastruktur, investasi, dan kualitas kelembagaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi PAD, diversifikasi ekonomi, peningkatan investasi, serta penguatan kapasitas fiskal untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

b. Analisis Rasio Derajat Otonomi Fiskal di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan Tahun 2014-2021.

Tingkat Otonomi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat Otonomi Fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah. Rasio Otonomi Fiskal juga merupakan rasio untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan. Rasio Otonomi Fiskal, khususnya komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) di kali 100% (seratus persen). Secara umum, semakin tinggi Skala Interval Derajat Otonomi Fiskal berarti semakin tinggi tingkat Kinerja Keuangan Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya. Dan sebaliknya, semakin rendah Skala Interval Derajat Otonomi Fiskal berarti semakin rendah Kinerja Keuangan Daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Analisis Rasio Derajat Otonomi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Otonomi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan, diperoleh besarnya rasio otonomi fiskal di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan tahun 2014-2021 sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio Derajat Otonomi Fiskal di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan

Provinsi	Kota/Kabupaten	Tahun								Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Prov. Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	4.99	3.92	4.06	4.23	28.55	4.66	5.35	5.94	7.71
	Kab. Landak	8.66	3.91	4.11	9.66	40.65	6.74	7.55	7.33	11.08
	Kab. Kapuas Hulu	6.47	4.80	3.93	7.79	21.11	4.35	4.77	4.44	7.21
	Kab. Ketapang	7.13	6.72	7.11	8.42	52.38	8.22	10.23	11.12	13.92
	Kab. Mempawah	7.79	6.05	6.34	7.22	44.32	8.48	10.10	9.41	12.46
	Kab. Sambas	9.92	6.11	6.67	12.26	23.30	8.11	7.77	8.01	10.27
	Kab. Sanggau	7.19	6.70	7.04	9.97	43.73	7.11	7.75	7.81	12.16
	Kab. Sintang	7.95	6.94	6.47	5.80	56.77	8.73	7.13	8.81	13.57
	Kota Pontianak	22.46	21.93	27.45	30.80	70.15	27.14	26.06	26.27	31.53
	Kota Singkawang	12.23	12.66	13.07	15.62	36.84	18.07	18.67	19.79	18.37
	Kab. Sekadau	5.36	4.67	4.68	8.61	44.55	5.17	5.28	5.18	10.44
	Kab. Melawi	3.41	3.23	3.23	5.70	48.71	3.49	3.10	5.01	9.48
	Kab. Kayong Utara	3.34	2.19	1.54	4.64	21.20	3.68	5.34	4.01	5.74
Kab. Kubu Raya	8.90	6.68	7.31	10.82	72.40	11.27	10.22	10.36	17.24	
Rata-rata		8.27	6.89	7.36	10.11	43.19	8.95	9.24	9.53	12.94
Prov. Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	4.17	4.49	4.72	5.29	13.67	7.68	5.75	9.77	6.94
	Kab. Barito Utara	4.85	5.14	4.66	6.02	16.88	5.93	6.65	8.43	7.32
	Kab. Kapuas	5.80	5.94	5.00	5.43	24.25	8.25	7.48	8.09	8.78
	Kab. Kotawaringin Barat	12.00	11.84	10.84	13.43	34.31	12.54	15.50	24.00	16.81
	Kab. Kotawaringin Timur	13.40	11.23	11.25	15.58	35.73	12.25	14.40	17.43	16.41
	Kota Palangka Raya	9.10	11.41	10.63	13.80	61.24	15.22	15.85	22.99	20.03
	Kab. Katingan	5.46	3.83	4.11	4.56	25.52	5.14	5.29	5.47	7.42
	Kab. Seruyan	3.68	4.59	5.46	10.06	50.24	7.92	6.95	7.46	12.05
	Kab. Sukamara	3.94	4.35	5.19	7.40	14.19	5.61	6.34	8.39	6.93
	Kab. Lamandau	5.28	5.18	4.83	18.80	68.18	8.31	6.36	10.49	15.93
	Kab. Gunung Mas	4.28	3.89	3.82	3.52	33.97	7.29	6.67	7.89	8.92
	Kab. Pulang Pisau	4.40	4.03	3.83	3.79	30.36	8.06	4.60	12.25	8.92
	Kab. Murung Raya	4.15	5.21	2.83	5.91	17.09	6.66	6.48	8.51	7.11
Kab. Barito Timur	8.00	4.73	4.02	12.31	23.73	6.33	7.05	10.23	9.55	
Rata-rata		6.32	6.13	5.80	8.99	32.10	8.37	8.24	11.53	10.94
Prov. Kalimantan Selatan	Kab. Banjar	13.07	11.49	11.09	11.03	38.01	11.73	11.75	12.81	15.12
	Kab. Barito Kuala	7.11	5.94	4.86	7.53	54.84	6.25	5.42	8.48	12.55
	Kab. Hulu Sungai Selatan	9.35	9.02	8.11	12.46	9.73	11.24	14.95	18.45	11.66
	Kab. Hulu Sungai Tengah	9.52	7.51	7.65	10.52	14.07	9.52	12.75	11.18	10.34
	Kab. Hulu Sungai Utara	10.08	9.08	7.92	12.16	10.78	11.03	10.15	11.27	10.31
	Kab. Kotabaru	8.67	10.70	9.88	8.56	48.09	8.19	9.55	12.60	14.53
	Kab. Tabalong	11.90	9.90	8.96	13.79	38.88	11.19	11.49	13.29	14.92
	Kab. Tanah Laut	11.17	11.54	10.25	13.72	25.38	9.07	11.75	13.54	13.30
	Kab. Tapin	5.93	5.26	5.07	8.52	23.30	7.13	8.33	10.10	9.20
Kota Banjarbaru	14.70	15.64	15.86	22.81	56.95	23.38	20.63	28.97	24.87	

	Kota Banjarmasin	15.11	16.06	16.27	21.94	68.39	19.98	17.60	22.32	24.71
	Kab. Balangan	6.85	5.22	4.62	7.90	16.05	5.45	7.36	12.02	8.18
	Kab. Tanah Bumbu	9.87	9.29	7.94	11.28	38.26	7.78	10.42	9.51	13.04
Rata-rata		10.26	9.74	9.11	12.48	34.06	10.92	11.70	14.20	14.06
Prov. Kalimantan Timur	Kab. Berau	10.19	11.06	10.41	10.14	30.36	7.81	9.90	11.99	12.73
	Kab. Kutai Kartanegara	5.25	6.24	6.47	12.80	20.00	9.62	10.11	15.92	10.80
	Kab. Kutai Barat	5.95	4.04	4.49	7.87	22.38	6.60	6.64	7.22	8.15
	Kab. Kutai Timur	6.47	4.15	15.30	7.55	44.47	5.24	6.13	8.12	12.18
	Kab. Paser	5.22	5.40	6.41	7.35	22.60	6.27	7.21	12.12	9.07
	Kota Balikpapan	30.12	25.96	28.11	32.67	73.35	30.94	24.21	33.14	34.81
	Kota Bontang	11.02	10.53	14.13	15.94	59.86	14.76	13.06	20.38	19.96
	Kota Samarinda	15.31	14.68	16.06	22.71	70.72	16.75	16.89	20.06	24.15
	Kab. Penajam Paser Utara	4.33	5.14	16.78	10.44	27.44	5.82	6.63	7.19	10.47
Kab. Mahakam Ulu	0.47	1.59	1.66	1.23	5.00	1.23	1.69	2.85	1.96	
Rata-rata		9.43	8.88	11.98	12.87	37.62	10.50	10.25	13.90	14.43
Prov. Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	7.97	12.09	8.22	11.04	32.30	10.76	11.54	12.37	13.29
	Kab. Malinau	5.61	5.57	3.56	4.51	15.84	4.78	4.47	5.27	6.20
	Kab. Nunukan	6.87	9.81	5.54	6.66	17.68	8.66	9.57	12.61	9.68
	Kota Tarakan	6.52	11.26	6.13	8.67	62.78	7.95	11.67	14.11	16.14
	Kab. Tana Tidung	4.17	6.89	2.82	4.11	14.79	2.81	1.64	2.57	4.97
Rata-rata		6.23	9.12	5.25	7.00	28.68	6.99	7.78	9.39	10.05

Sumber: Data diolah

Secara umum, rasio otonomi fiskal kabupaten/kota di lima provinsi regional Kalimantan relatif rendah dan tidak menunjukkan perbedaan signifikan, meskipun terdapat variasi antar daerah.

Di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang memiliki rasio tertinggi (18,53% – kategori Kurang), sedangkan Kabupaten Kubu Raya terendah (9,78% – Sangat Kurang). Ketimpangan ini disebabkan belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal serta lemahnya strategi pengelolaan PAD.

Di Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki rasio tertinggi (16,81% – Kurang), sementara Kabupaten Gunung Mas terendah (3,62% – Sangat Kurang). Rendahnya kemandirian fiskal dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur dan belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya alam.

Di Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut mencatat rasio tertinggi (13,30% – Kurang), sedangkan Kabupaten Tanah Bumbu terendah (7,61% – Sangat Kurang). Meskipun memiliki potensi sektor tambang dan perkebunan, pengelolaan PAD masih lemah akibat rendahnya investasi dan perencanaan fiskal.

Di Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki rasio tertinggi (20,80% – Cukup), sedangkan Kabupaten Paser terendah (9,07%). Meskipun didukung sektor ekstraktif, kontribusi terhadap PAD masih terbatas karena sistem bagi hasil yang lebih menguntungkan pemerintah pusat.

Di Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan memiliki rasio tertinggi (14,28% – Kurang), sedangkan Kota Tarakan terendah (7,95%). Sebagai provinsi baru, wilayah ini masih memiliki keterbatasan dalam sistem ekonomi dan kapasitas fiskal.

Secara komparatif, Kalimantan Timur relatif lebih baik karena dukungan sektor sumber daya alam, sedangkan Kalimantan Utara paling rendah karena faktor usia provinsi dan keterbatasan infrastruktur. Kalimantan Barat dan Tengah menghadapi ketimpangan antar daerah, sementara Kalimantan Selatan cenderung stagnan.

Kesimpulannya, tantangan utama seluruh provinsi adalah rendahnya optimalisasi potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan PAD. Diperlukan strategi berupa penguatan kapasitas fiskal, peningkatan investasi, hilirisasi sektor unggulan, serta penguatan kelembagaan agar kemandirian fiskal dapat tercapai dan ketergantungan terhadap dana pusat berkurang.

c. Analisis Indeks Kemampuan Rutin di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan Tahun 2014-2021.

Indeks Kemampuan Rutin yaitu Proporsi antara PAD dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari pemerintah pusat yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri pengeluaran rutinnya dengan PAD dan Pengeluaran rutin sebagai tolak ukurnya tanpa campur tangan pemerintah pusat. Dalam penelitian ini belanja rutin di peroleh dari bagian belanja tidak langsung.

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKR = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Belanja Rutin}} \times 100\%$$

Berikut Tabel Hasil penelitian Indeks Kemampuan Rutin (IKR) di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan tahun 2014-2021:

Tabel 3. Indeks Kemampuan Rutin di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan Tahun 2014-2021

Provinsi	Kota/Kabupaten	Tahun								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Prov. Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	6.09	5.62	5.31	5.12	3.95	6.05	7.27	6.69	5.76
	Kab. Landak	11.93	5.89	6.03	12.65	7.92	9.46	11.09	8.51	9.19
	Kab. Kapuas Hulu	7.87	6.29	4.99	10.11	3.09	5.75	6.66	4.84	6.20
	Kab. Ketapang	8.40	8.75	8.84	10.81	12.71	11.44	15.03	13.01	11.12
	Kab. Mempawah	10.44	7.74	7.83	9.11	8.69	11.15	14.25	10.94	10.02
	Kab. Sambas	13.09	8.58	8.21	16.32	4.91	11.37	11.04	9.40	10.37
	Kab. Sanggau	9.03	9.09	8.82	12.86	10.06	9.55	11.40	8.97	9.97
	Kab. Sintang	9.60	9.07	8.38	8.06	21.73	13.12	11.29	10.18	11.43
	Kota Pontianak	41.08	45.74	43.72	52.56	54.14	50.66	46.41	37.90	46.53
	Kota Singkawang	16.69	17.72	17.04	22.07	12.93	25.01	26.81	25.98	20.53
	Kab. Sekadau	6.67	6.24	5.62	11.02	9.80	6.90	7.82	5.73	7.48
	Kab. Melawi	3.78	4.00	3.89	7.12	5.47	4.57	4.32	5.53	4.83
	Kab. Kayong Utara	3.71	2.54	1.73	5.34	2.50	4.47	6.77	4.33	3.92
Kab. Kubu Raya	11.57	9.69	9.62	14.56	25.18	15.93	15.65	12.28	14.31	
Rata-rata		11.42	10.50	10.00	14.12	13.08	13.25	13.99	11.73	
Prov. Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	4.85	5.50	5.61	6.41	2.79	9.78	7.74	11.13	6.72
	Kab. Barito Utara	5.77	6.39	5.80	8.06	2.88	7.84	8.98	9.40	6.89
	Kab. Kapuas	7.29	8.09	6.19	6.99	4.32	11.12	10.10	9.07	7.90
	Kab. Kotawaringin Barat	16.33	17.35	14.34	18.85	13.96	17.69	23.43	32.58	19.32

	Kab. Kotawaringin Timur	18.34	16.44	15.73	22.32	13.32	18.00	22.29	24.72	18.90
	Kota Palangka Raya	12.77	17.30	15.26	17.93	19.40	20.31	21.99	31.03	19.50
	Kab. Katingan	6.42	4.78	5.04	5.76	3.06	6.58	7.02	5.97	5.58
	Kab. Seruyan	4.09	5.50	6.57	12.82	14.12	10.10	8.93	8.26	8.80
	Kab. Sukamara	4.43	5.01	5.79	8.76	2.96	6.93	8.15	9.31	6.42
	Kab. Lamandau	6.08	6.29	5.97	26.95	19.34	11.06	8.69	12.26	12.08
	Kab. Gunung Mas	4.86	4.89	4.55	4.23	4.32	9.60	9.06	8.82	6.29
	Kab. Pulang Pisau	5.33	5.08	4.51	4.84	3.62	10.59	5.96	14.29	6.78
	Kab. Murung Raya	4.73	6.39	3.27	7.16	2.04	8.68	8.52	9.57	6.30
	Kab. Barito Timur	9.97	6.06	4.98	16.48	3.30	8.28	9.54	11.64	8.78
Rata-rata		7.95	8.22	7.40	11.97	7.82	11.18	11.46	14.15	
Prov. Kalimantan Selatan	Kab. Banjar	18.39	17.15	15.01	16.73	11.22	17.51	18.63	15.27	16.24
	Kab. Barito Kuala	9.50	7.85	5.94	10.68	12.50	8.92	7.83	9.66	9.11
	Kab. Hulu Sungai Selatan	12.56	12.63	10.70	17.39	2.81	15.88	23.42	23.10	14.81
	Kab. Hulu Sungai Tengah	12.95	10.41	10.41	15.38	2.90	13.27	19.08	13.17	12.20
	Kab. Hulu Sungai Utara	14.15	13.22	10.25	18.14	2.74	17.00	15.57	12.92	13.00
	Kab. Kotabaru	11.58	15.14	13.13	12.41	13.27	11.80	14.55	14.94	13.35
	Kab. Tabalong	16.33	13.56	11.20	19.69	14.07	16.15	17.53	15.86	15.55
	Kab. Tanah Laut	16.23	16.52	13.09	20.36	6.16	11.91	17.17	16.18	14.70
	Kab. Tapin	7.51	6.66	6.48	11.53	5.27	9.62	11.84	11.56	8.81
	Kota Banjarbaru	22.32	23.23	20.55	35.69	32.27	36.36	32.79	42.65	30.73
	Kota Banjarmasin	25.69	26.62	22.20	32.73	32.22	31.65	28.32	30.41	28.73
	Kab. Balangan	8.53	6.65	5.49	10.46	3.33	6.87	10.67	14.06	8.26
Kab. Tanah Bumbu	14.43	12.82	10.71	17.43	11.73	10.33	14.28	10.93	12.83	
Rata-rata		14.15	13.62	11.61	17.90	11.31	15.60	17.37	17.49	
Prov. Kalimantan Timur	Kab. Berau	14.63	14.84	13.89	15.87	10.96	11.45	14.29	13.93	13.73
	Kab. Kutai Kartanegara	6.45	8.00	7.79	17.53	4.02	12.69	12.79	19.56	11.10
	Kab. Kutai Barat	8.22	5.53	5.72	11.29	5.07	9.21	9.21	7.94	7.77
	Kab. Kutai Timur	8.23	5.51	21.51	11.43	9.14	7.68	8.55	9.12	10.15
	Kab. Paser	8.06	8.30	8.64	11.44	4.56	10.25	11.45	14.12	9.60
	Kota Balikpapan	56.95	50.55	52.54	74.90	65.07	67.26	42.95	52.32	57.82
	Kota Bontang	15.59	14.18	18.69	23.57	28.08	21.96	19.21	26.63	20.99
	Kota Samarinda	28.31	27.21	24.19	41.50	29.06	31.06	31.71	26.42	29.93
	Kab. Penajam Paser Utara	5.45	7.16	24.08	15.80	3.88	7.87	9.50	7.95	10.21
Kab. Mahakam Ulu	0.71	1.82	1.88	1.49	0.56	1.50	1.93	2.96	1.61	
Rata-rata		15.39	14.49	16.35	21.67	15.64	17.53	16.59	18.13	
Prov. Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	9.72	17.20	10.92	15.81	8.90	14.78	15.97	14.54	13.48
	Kab. Malinau	6.62	7.22	4.54	5.48	1.90	5.93	5.69	5.65	5.38
	Kab. Nunukan	8.16	13.72	7.66	10.06	3.45	12.58	14.69	14.85	10.65
	Kota Tarakan	8.30	15.56	8.87	11.45	11.48	9.60	15.59	17.22	12.26
	Kab. Tana Tidung	4.75	8.30	3.13	4.83	1.30	3.25	1.92	2.66	3.77
Rata-rata		13.17	14.05	14.91	18.62	13.43	15.75	14.64	15.75	

Sumber: Data diolah

Secara ringkas, tingkat Indeks Kemandirian Keuangan (IKR) di wilayah Kalimantan menunjukkan ketimpangan yang cukup jelas antar daerah, dengan sebagian kecil kota memiliki kapasitas fiskal kuat, sementara mayoritas kabupaten masih sangat bergantung pada transfer pusat.

Di Kalimantan Barat, Kota Pontianak mencatat IKR tertinggi (52,44% - sangat baik), didukung sektor perdagangan dan jasa serta pengelolaan pajak yang efisien.

Sebaliknya, Kabupaten Bengkayang (7,93% – sangat kurang) masih lemah akibat rendahnya PAD, dominasi sektor subsisten, dan minimnya digitalisasi pajak.

Di Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya memiliki IKR tertinggi (19,50% – kurang), namun masih menunjukkan kapasitas fiskal yang terbatas. Kabupaten Katingan menjadi yang terendah (6,82% – sangat kurang), dipengaruhi minimnya diversifikasi PAD dan lemahnya infrastruktur fiskal.

Di Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru (42,22% – baik) menunjukkan kinerja cukup solid berkat perkembangan sektor jasa dan perumahan. Sebaliknya, Kabupaten Tapin (12,67% – kurang) masih bergantung pada transfer pusat karena pengelolaan potensi ekonomi belum optimal.

Di Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menjadi yang tertinggi di seluruh Kalimantan (57,82% – sangat baik), ditopang sektor migas, jasa, dan transportasi. Sementara itu, Kabupaten Mahakam Ulu (1,61% – sangat kurang) menghadapi kendala besar seperti keterbatasan infrastruktur, ekonomi lokal yang sempit, dan status sebagai daerah baru.

Di Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan memiliki IKR tertinggi (13,48% – kurang), sedangkan Kabupaten Tana Tidung terendah (3,66% – sangat kurang). Secara umum, provinsi ini masih sangat bergantung pada dana pusat karena kelembagaan fiskal yang belum kuat dan basis ekonomi yang terbatas.

Secara keseluruhan, hanya kota-kota besar yang menunjukkan kemandirian fiskal yang baik, sementara sebagian besar kabupaten masih berada pada kategori “kurang” hingga “sangat kurang”. Tantangan utama meliputi rendahnya optimalisasi PAD, keterbatasan infrastruktur, serta lemahnya kapasitas kelembagaan fiskal. Upaya perbaikan perlu difokuskan pada penguatan PAD, digitalisasi sistem pajak, pengembangan BUMD, dan diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal.

Analisis Rasio Ketergantungan di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan Tahun 2014-2021.

Rasio Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan).

Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dibandingkan total pendapatan tanpa subsidi. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah propinsi.

Rasio Tingkat ketergantungan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{DAU} + \text{DAK} + \text{Bantuan Keuangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh data Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten-Kota Regional Kalimantan tahun 2014-2021:

Tabel 4. Rasio Ketergantungan di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan Tahun 2014-2021

Provinsi	Kota/Kabupaten	Tahun								Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Prov. Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	77.49	76.06	81.51	81.22	79.30	80.16	75.91	83.69	79.42
	Kab. Landak	68.56	69.99	70.75	76.38	74.68	74.35	70.91	80.87	73.31
	Kab. Kapuas Hulu	79.87	72.97	75.61	77.07	77.10	77.12	73.31	88.61	77.71
	Kab. Ketapang	74.89	69.04	73.68	77.89	70.26	72.46	66.63	80.99	73.23
	Kab. Mempawah	71.45	76.20	79.03	79.24	78.62	77.82	72.33	79.76	76.81
	Kab. Sambas	72.43	69.09	79.29	75.12	76.29	75.30	74.66	81.81	75.50
	Kab. Sanggau	73.10	67.82	75.38	77.50	74.12	74.13	72.76	82.00	74.60
	Kab. Sintang	78.40	72.95	73.90	72.02	67.28	68.79	66.48	81.97	72.72
	Kota Pontianak	51.46	51.56	59.95	58.60	57.33	55.29	58.10	62.42	56.84
	Kota Singkawang	70.03	69.46	74.56	70.76	71.54	74.11	71.52	71.75	71.72
	Kab. Sekadau	78.33	75.12	81.62	78.16	77.19	78.08	68.98	84.02	77.69
	Kab. Melawi	83.97	75.66	80.06	80.08	77.33	78.17	74.06	85.86	79.40
	Kab. Kayong Utara	84.53	83.24	86.82	87.02	84.15	83.57	79.63	88.38	84.67
Kab. Kubu Raya	71.68	71.13	81.16	74.31	73.66	73.84	69.85	77.49	74.14	
Rata-rata		74.01	71.45	76.67	76.10	74.20	74.51	71.08	80.69	
Prov. Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	75.79	73.59	81.83	82.60	74.22	74.44	67.73	85.00	76.90
	Kab. Barito Utara	64.92	65.56	61.33	74.77	58.67	63.40	62.24	86.01	67.11
	Kab. Kapuas	69.93	70.06	74.93	77.69	70.03	65.51	65.39	85.96	72.44
	Kab. Kotawaringin Barat	66.04	68.08	70.22	71.24	66.21	66.49	64.33	68.77	67.67
	Kab. Kotawaringin Timur	63.78	64.66	67.22	69.78	65.03	66.45	62.77	64.46	65.52
	Kota Palangka Raya	65.65	65.59	70.30	76.96	61.04	72.17	65.87	66.66	68.03
	Kab. Katingan	74.93	69.41	73.78	79.15	73.77	71.80	70.61	88.95	75.30
	Kab. Seruyan	74.92	72.05	68.98	78.53	72.85	71.92	73.57	87.23	75.01
	Kab. Sukamara	81.32	80.67	83.44	84.51	79.92	77.05	69.83	86.73	80.43
	Kab. Lamandau	75.03	76.65	75.81	69.73	68.05	68.25	66.12	84.42	73.01
	Kab. Gunung Mas	75.90	74.93	77.65	83.37	76.42	72.41	69.72	86.39	77.10
	Kab. Pulang Pisau	76.55	74.59	81.04	78.34	75.18	74.00	73.20	82.69	76.95
Kab. Murung Raya	63.77	58.11	70.23	82.57	71.16	70.17	65.38	86.62	71.00	
Kab. Barito Timur	69.07	68.08	76.60	74.71	70.39	70.84	66.77	85.20	72.71	
Rata-rata		71.26	70.15	73.81	77.42	70.21	70.35	67.40	81.79	
Prov. Kalimantan Selatan	Kab. Banjar	53.16	49.12	56.86	65.92	58.75	55.98	56.63	81.18	59.70
	Kab. Barito Kuala	64.49	61.98	69.59	70.46	62.32	63.95	60.60	83.21	67.07
	Kab. Hulu Sungai Selatan	58.06	57.11	54.48	71.65	55.83	54.14	49.24	74.74	59.41
	Kab. Hulu Sungai Tengah	60.18	58.66	60.88	68.45	61.62	69.81	69.30	79.74	66.08
	Kab. Hulu Sungai Utara	57.50	57.41	64.40	67.03	58.96	56.41	52.54	81.69	61.99
	Kab. Kotabaru	48.95	44.91	51.32	69.00	57.29	55.39	54.31	81.23	57.80
	Kab. Tabalong	42.67	41.68	48.19	70.02	46.03	46.91	44.86	76.84	52.15
	Kab. Tanah Laut	44.76	42.17	53.44	67.38	51.80	44.38	45.13	77.37	53.30
	Kab. Tapin	49.40	48.80	59.29	73.88	50.39	45.73	49.78	82.04	57.41
	Kota Banjarbaru	51.70	52.07	62.11	63.90	56.04	54.57	48.50	59.83	56.09
	Kota Banjarmasin	49.08	49.36	60.86	67.04	58.22	58.56	53.29	62.69	57.39
	Kab. Balangan	46.52	39.04	41.32	75.52	39.04	36.43	42.42	80.69	50.12
Kab. Tanah Bumbu	46.15	41.26	42.50	64.72	34.72	37.77	43.35	80.60	48.88	

Rata-rata		51.74	49.51	55.79	68.84	53.15	52.31	51.53	77.07	
Prov. Kalimantan Timur	Kab. Berau	21.39	21.64	32.65	63.90	33.62	28.06	31.53	69.93	37.84
	Kab. Kutai Kartanegara	2.81	0.00	8.02	73.01	17.01	13.60	20.65	72.47	25.95
	Kab. Kutai Barat	31.27	25.68	38.92	69.70	36.88	30.66	32.49	77.48	42.89
	Kab. Kutai Timur	17.59	11.38	20.98	66.05	23.94	25.24	25.00	71.38	32.70
	Kab. Paser	14.94	13.76	26.09	64.19	27.95	23.78	24.72	58.53	31.75
	Kota Balikpapan	18.48	17.89	23.63	43.62	22.69	27.48	26.58	46.89	28.41
	Kota Bontang	15.96	17.48	31.42	67.65	24.39	21.09	20.01	67.71	33.21
	Kota Samarinda	21.82	24.05	37.82	54.71	36.12	31.27	34.72	50.57	36.38
	Kab. Penajam Paser Utara	14.24	11.31	23.55	66.07	32.73	25.37	32.40	72.48	34.77
Kab. Mahakam Ulu	38.90	32.71	45.69	82.19	46.09	45.57	41.82	85.45	52.30	
Rata-rata		19.74	17.59	28.88	65.11	30.14	27.21	28.99	67.29	
Prov. Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	21.52	32.34	43.83	69.82	58.09	60.24	59.79	79.53	53.15
	Kab. Malinau	39.41	55.65	59.26	82.26	68.36	65.54	63.37	89.18	65.38
	Kab. Nunukan	24.82	33.57	42.83	66.18	53.73	74.40	54.86	80.11	53.81
	Kota Tarakan	18.71	32.04	43.96	75.66	60.82	60.44	59.69	73.80	53.14
	Kab. Tana Tidung	18.63	35.99	57.92	84.96	69.63	67.16	67.60	93.63	61.94
Rata-rata		24.62	37.92	49.56	75.78	62.13	65.56	61.06	83.25	

Sumber: Data diolah

Secara ringkas, analisis rasio ketergantungan keuangan daerah di wilayah Kalimantan menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, meskipun terdapat variasi antarprovinsi dan kabupaten/kota.

Di Kalimantan Barat, tingkat ketergantungan sangat tinggi dengan rata-rata 76,68%. Kabupaten Melawi menjadi yang paling bergantung (84,52%), sedangkan Kota Pontianak relatif lebih rendah (56,84%) namun tetap dalam kategori tinggi. Penyebab utamanya adalah rendahnya PAD, keterbatasan kewenangan pajak, dominasi sektor primer, serta kendala infrastruktur dan kapasitas pengelolaan keuangan.

Di Kalimantan Tengah, rata-rata ketergantungan mencapai 72,56%. Kabupaten Katingan tertinggi (84,00%), sementara Kota Palangka Raya terendah (61,84%) namun tetap tinggi. Faktor utama meliputi rendahnya PAD, ketergantungan pada sektor ekstraktif, keterbatasan infrastruktur, serta lemahnya inovasi dan tata kelola fiskal.

Di Kalimantan Selatan, ketergantungan relatif lebih rendah dibanding provinsi lain dengan rata-rata 52,15%, tetapi masih tergolong tinggi. Kabupaten Banjar paling bergantung (59,09%), sedangkan Kabupaten Balangan paling rendah (37,00%). Permasalahan utama adalah lemahnya pemungutan pajak dan retribusi, dominasi dana transfer, serta keterbatasan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Di Kalimantan Timur, kondisi relatif lebih baik dengan rata-rata ketergantungan 38,53% (kategori cukup mandiri). Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki ketergantungan sangat rendah (7,62%), sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu masih tinggi (61,89%). Ketimpangan ini dipengaruhi oleh perbedaan potensi ekonomi, akses infrastruktur, dan kapasitas daerah.

Di Kalimantan Utara, ketergantungan masih sangat tinggi hampir di seluruh wilayah, terutama di Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan. Penyebabnya adalah

status provinsi baru, keterbatasan infrastruktur, rendahnya akses pasar, serta lemahnya kapasitas pengelolaan keuangan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Ketergantungan fiskal di seluruh wilayah Kalimantan masih didominasi oleh dana transfer pusat. Faktor utama yang memengaruhi adalah rendahnya PAD, keterbatasan struktur ekonomi, serta lemahnya kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi seperti penguatan basis pajak daerah, diversifikasi ekonomi, peningkatan infrastruktur, digitalisasi pengelolaan keuangan, serta reformasi kebijakan transfer berbasis kinerja untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis data tentang “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten-Kota Regional Kalimantan Tahun 2014-2021” adalah sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan daerah di Kabupaten/Kota Regional Kalimantan masih rendah. Sebagian besar daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan yang tergolong sangat kurang hingga kurang, yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menjadi sumber utama pembiayaan APBD. Rasio otonomi fiskal dan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) juga masih rendah, sehingga belanja rutin daerah masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi otonomi fiskal belum optimal, terutama dalam pemanfaatan potensi daerah serta pengelolaan pajak dan retribusi. Secara umum, daerah belum mampu membiayai kebutuhannya secara mandiri. Namun, terdapat pengecualian seperti Kota Balikpapan yang menunjukkan kinerja keuangan paling baik karena didukung sektor industri, jasa, dan perdagangan yang kuat. Berdasarkan rata-rata provinsi, Kalimantan Tengah memiliki kinerja terendah meskipun mengalami peningkatan bertahap, sedangkan Kalimantan Timur menjadi yang paling dominan.
2. Tingkat ketergantungan fiskal masih tinggi dan terjadi disparitas antar daerah. Lebih dari 60% pendapatan daerah masih berasal dari transfer pusat (DAU, DAK, DBH), yang menunjukkan bahwa tujuan otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian fiskal belum tercapai. Selain itu, terdapat kesenjangan kinerja fiskal antarwilayah. Daerah seperti Kota Balikpapan, Kota Banjarmasin, dan Kota Tarakan memiliki kinerja lebih baik karena didukung oleh basis ekonomi yang lebih maju. Sebaliknya, daerah di Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Utara cenderung memiliki kinerja rendah akibat keterbatasan infrastruktur, lemahnya basis ekonomi, dan rendahnya kapasitas kelembagaan.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah di Kalimantan masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai kemandirian fiskal, sehingga diperlukan optimalisasi PAD, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.

5. Daftar Pustaka

- Fitriani, D., Hafizrianda, Y., Ayu, I., & Riani, P. (2018). ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DI KABUPATEN JAYAPURA Penulis. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 33–41.
- Irwan, A. L. (2016). Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia. *Http://Berita.Knkg-Indonesia.Org*, 1(1), 90–98.

- Mardiasmo. (2010). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Nalle, F. W., Oki, K. K., Sangaji, P. M. M., (2021). *ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR*. 1, 184-197.
<http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>
- Wahab, L. O. A., Rofingatun, S., & Kreuta, B. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah pemerintah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Keuda*, 2(3), 1-17.
- Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kota Regional Kalimantan. (2021). *Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014-2021*.
- Fathiyah, F., Iskandar Nasution, Bambang Niko Pasla, Fahmi Rasid, & Muhammad Arif. (2022). Ratio Analysis of Regional Dependence and Independence in Measuring the Regional Financial Capability of the Jambi Provincial Government. *Jurnal Prajaiswara*, 3(1), 65-74. <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v3i1.43>
- Halim, A. (2009). *Problem Desentralisasi dan Keuangan Pemerintahan Pusat Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*.
- Kemendagri. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. 2017. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111422/permendagri-no-62-tahun-2017>
- Khusaini, M. (2006). *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFE Unibraw, Malang.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Bandung: Erlangga.
- Mardiasmo. (2010). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Marihot Pahala Siahaan, S. M. (2016). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Presiden RI. (2001). Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah. *Pp, Nomor 65 Tahun 2001*, 1, 2. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52718/pp-no-8-tahun-2001>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah Republik Indonesia 1 (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003, 4 (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 8 Pemerintah Republik Indonesia 44 (2014).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Republik Indonesia (2019). <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 1 (2022). <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Resmi, S. (2017). *Perajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, T. H., & Muklis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Pe ajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Statistik Daerah Kabupaten-Kota Regional Kalimantan*. (2019). Kabupaten-Kota Regional Kalimantan: Badan Pusat Statistik Kabupaten-Kota Regional Kalimantan.
- Statistik Kalimantan Tahun 2019*. (2019). Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

UU HKPD: Re-Design Desentralisasi fiskal. Dipetik Juni, 20, 2024, dari DJPB
KementerianKeuangan:

<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3890-uu-hkpd-re-design-desentralisasi-fiskal.html>

Yani, A. (2009). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.